



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II  
PERATURAN PRESIDEN  
NOMOR 41 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH LAUT NATUNA-  
NATUNA UTARA

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT  
KETERANGAN GAMBAR  
SKALA 1:500.000

#### Batas Administrasi

- Batas Negara
- - + Batas Laut Teritorial Belum Diratifikasi
- + Batas Laut Teritorial
- - + Batas Laut Teritorial Perlu Kesepakatan
- + Batas Zona Tambahan
- Batas Landas Kontinen
- Batas Zona Ekonomi Eksklusif
- - + Batas Zona Ekonomi Eksklusif Perlu Kesepakatan

#### Batas Wilayah Perencanaan

- Garis Pantai
- Batas Wilayah Perencanaan

#### Batas Wilayah Provinsi

- - - Batas Wilayah Provinsi



#### Alur Migrasi Biota Laut

- Alur Migrasi Penyu
- Singkatan  
P. = Pulau  
Tg. = Tanjung  
PL. = Pelabuhan Laut  
PP. = Pelabuhan Perikanan



#### RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

##### Susunan Pusat Pertumbuhan Kelautan

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan


-  Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap dan/Atau Perikanan Budi Daya
-  Pelabuhan Perikanan

Pusat Industri Kelautan


-  Sentra Industri Maritim
-  Sentra Industri Bioteknologi Kelautan

##### Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Laut

Sistem Jaringan Transportasi

-  Tatanan Kepelabuhanan Nasional
- Alur Laut Kepulauan Indonesia

Sistem Jaringan Energi dan Ketenagalistrikan

-  Pipa Bawah Laut
- × — Kabel Bawah Laut

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- ... Kabel Bawah Laut

#### Keterangan Peta

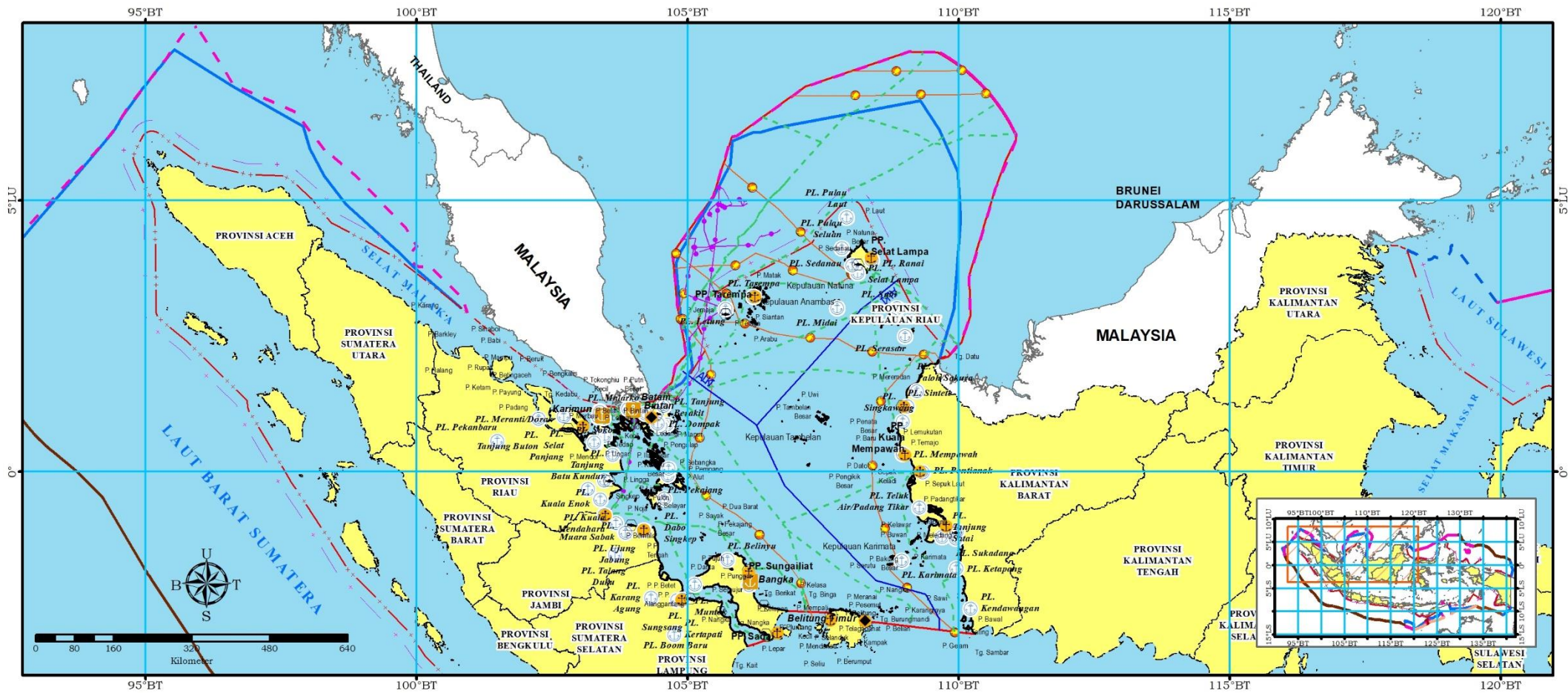
- Sistem Grid Geografis
- Datum Horizontal WGS 1984
- Skala ketelitian dalam peta ini 1:500.000. Peta ini dicetak sesuai dengan format lampiran dari Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Natuna-Natuna Utara
- Peta ini bersifat indikatif dan tidak dapat digunakan untuk telaah mikro
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi nasional dan internasional

#### Sumber Peta

- Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG)
- *Special Publication S-23 Name and Limit of Ocean and Seas* edisi ketiga tahun 1953 dan *Draft Special Publication S-23 Name and Limit of Ocean and Seas* edisi keempat tahun 2002 yang diterbitkan oleh *International Hydrographic Organization*

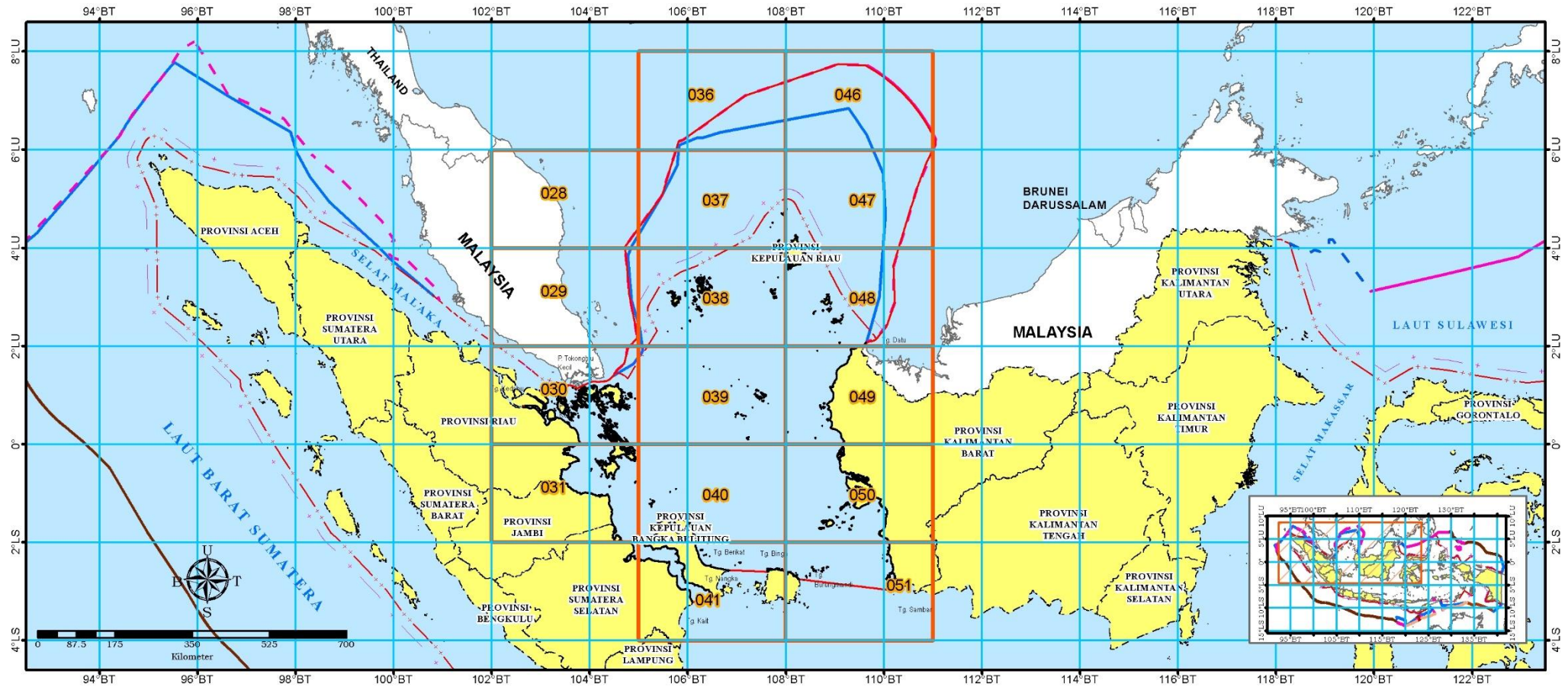


PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA





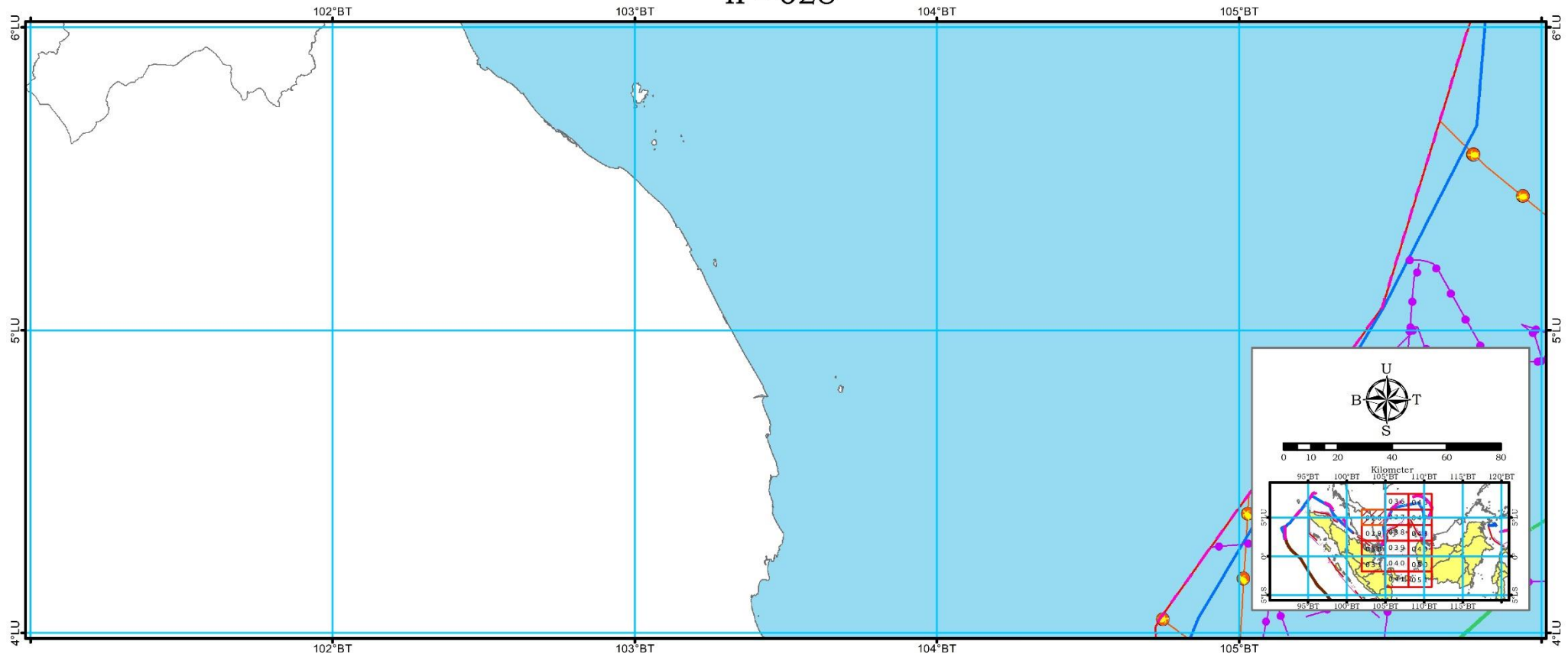
PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
PETA INDEKS





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

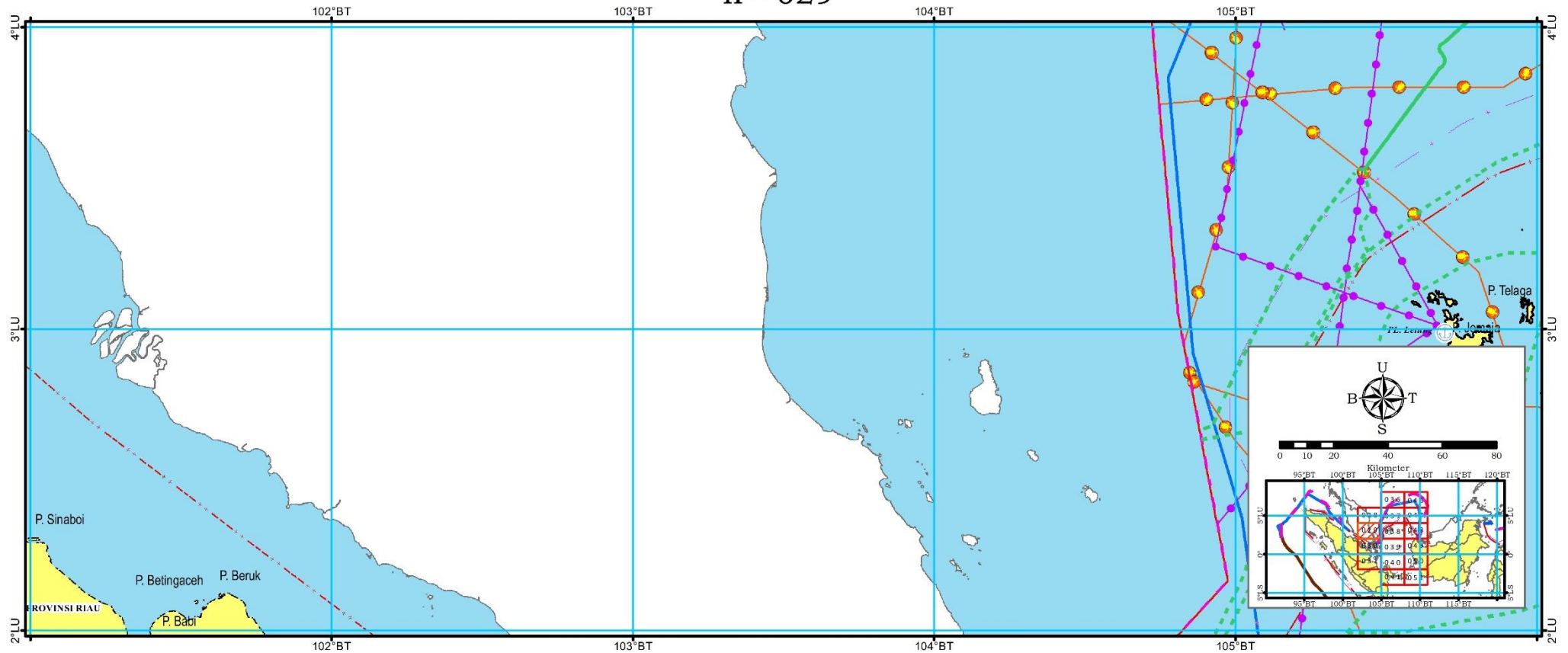
II - 028





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II - 029

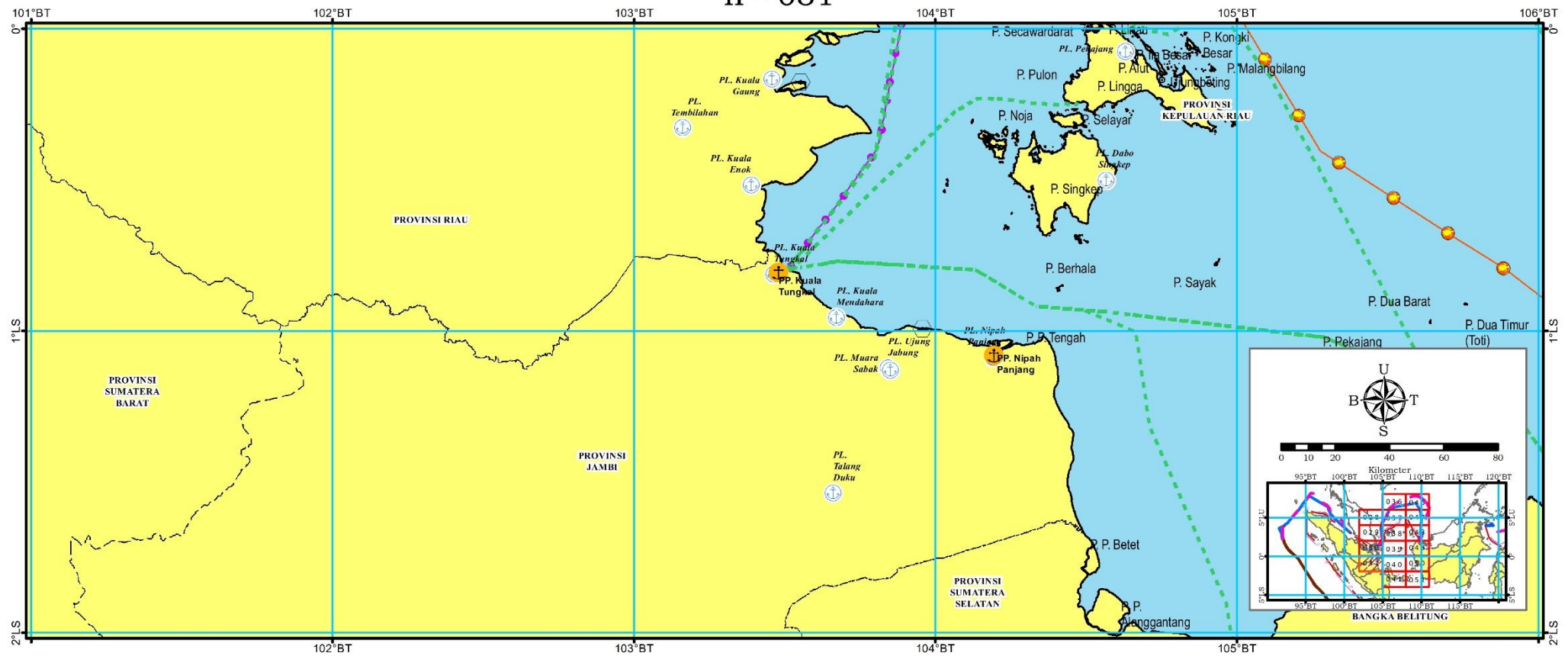






PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II - 031

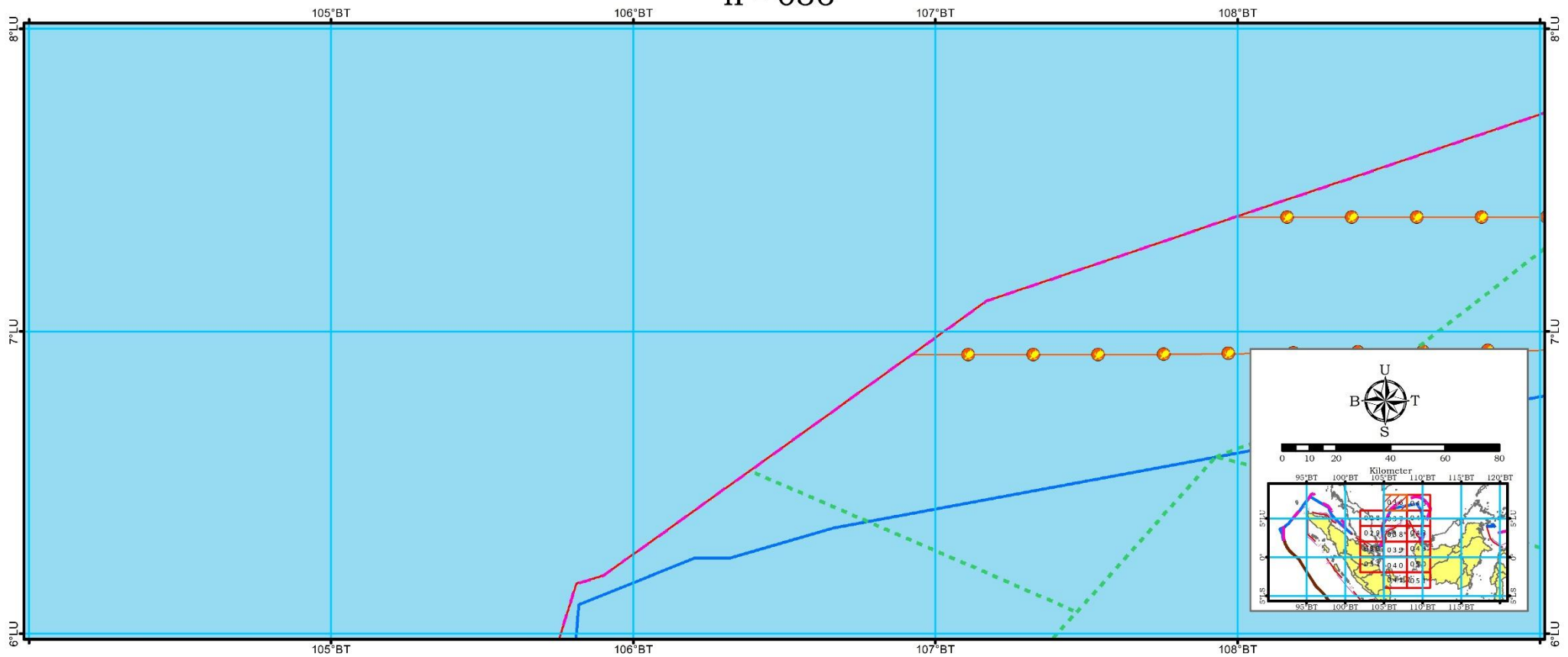






PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

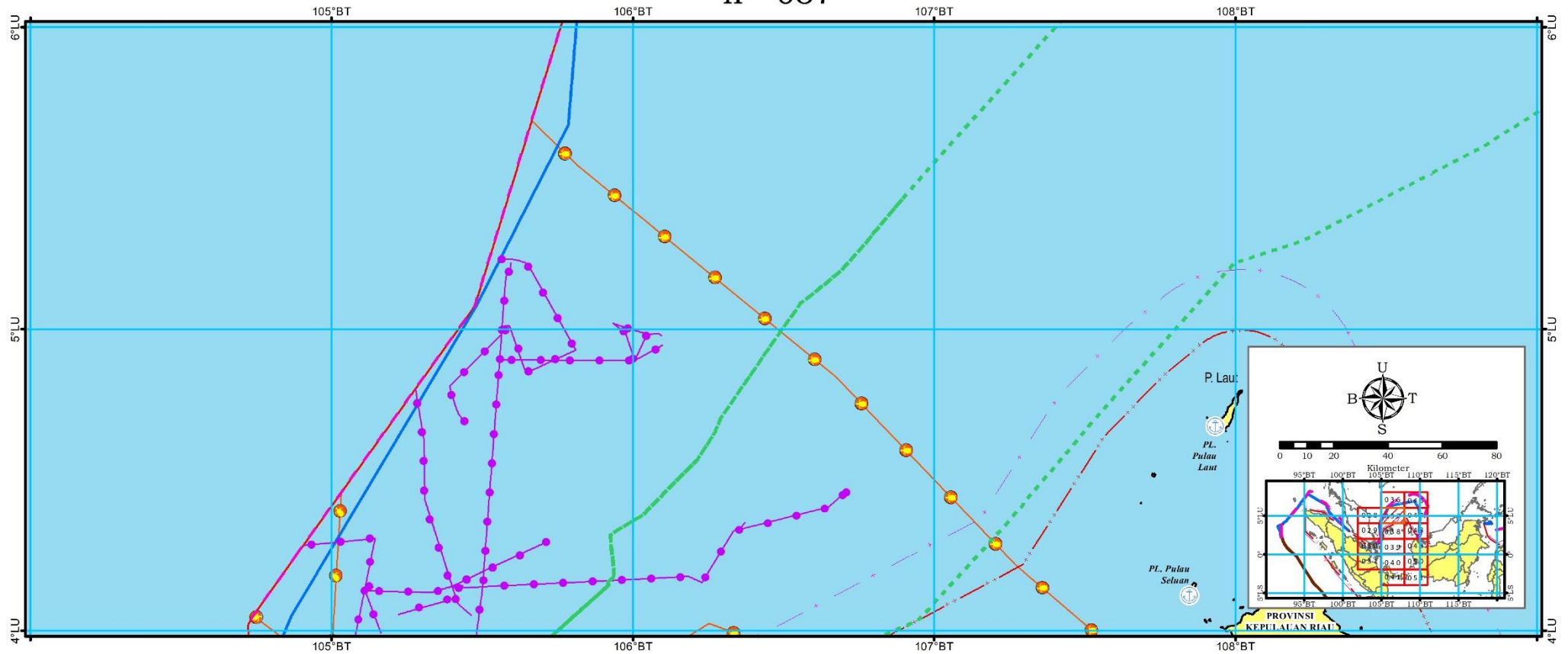
II - 036





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

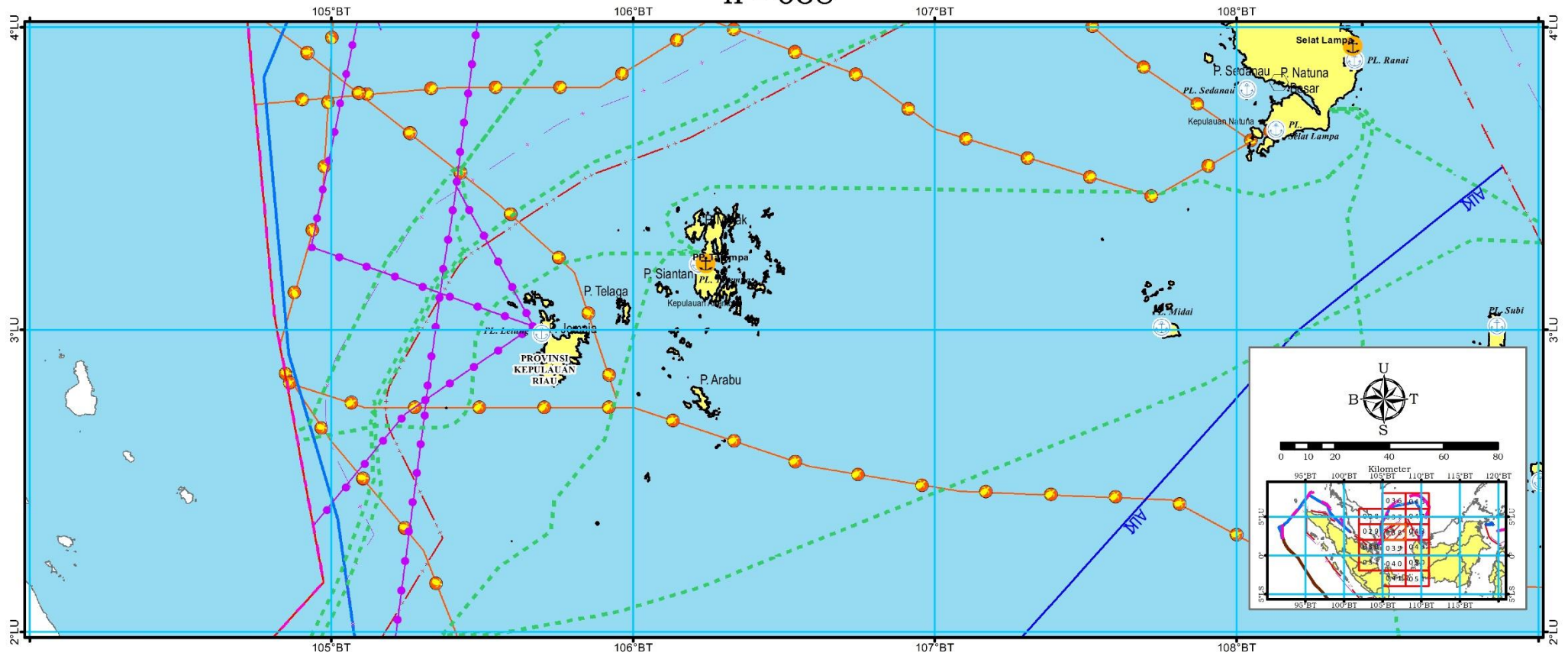
II - 037





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

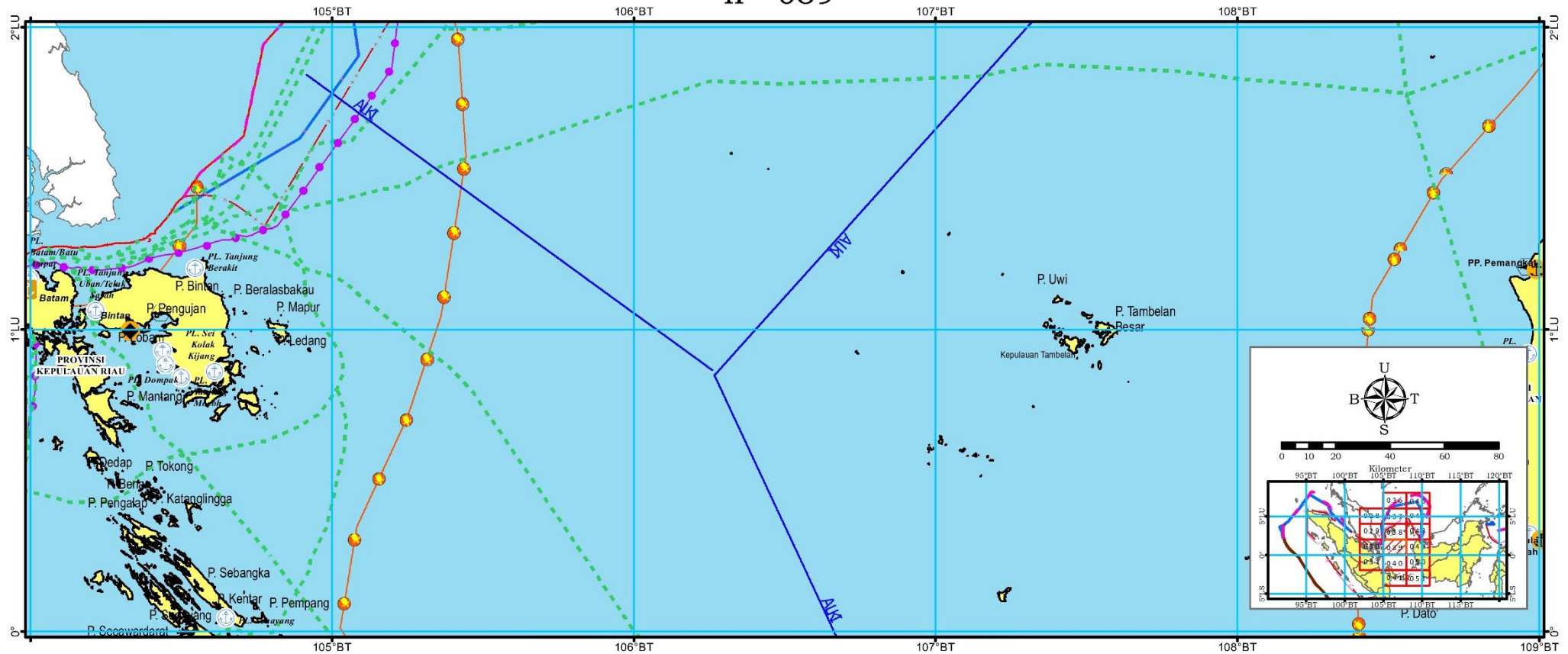
II - 038





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

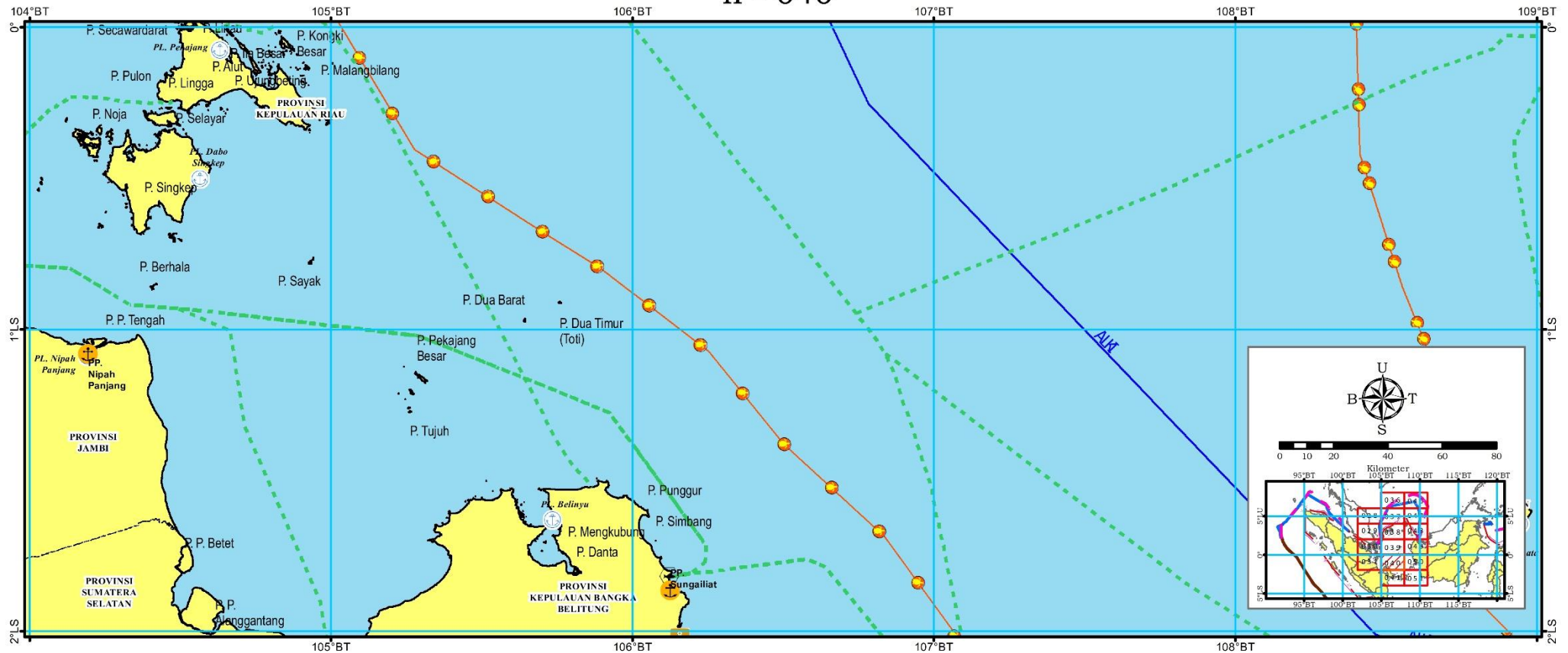
II - 039





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

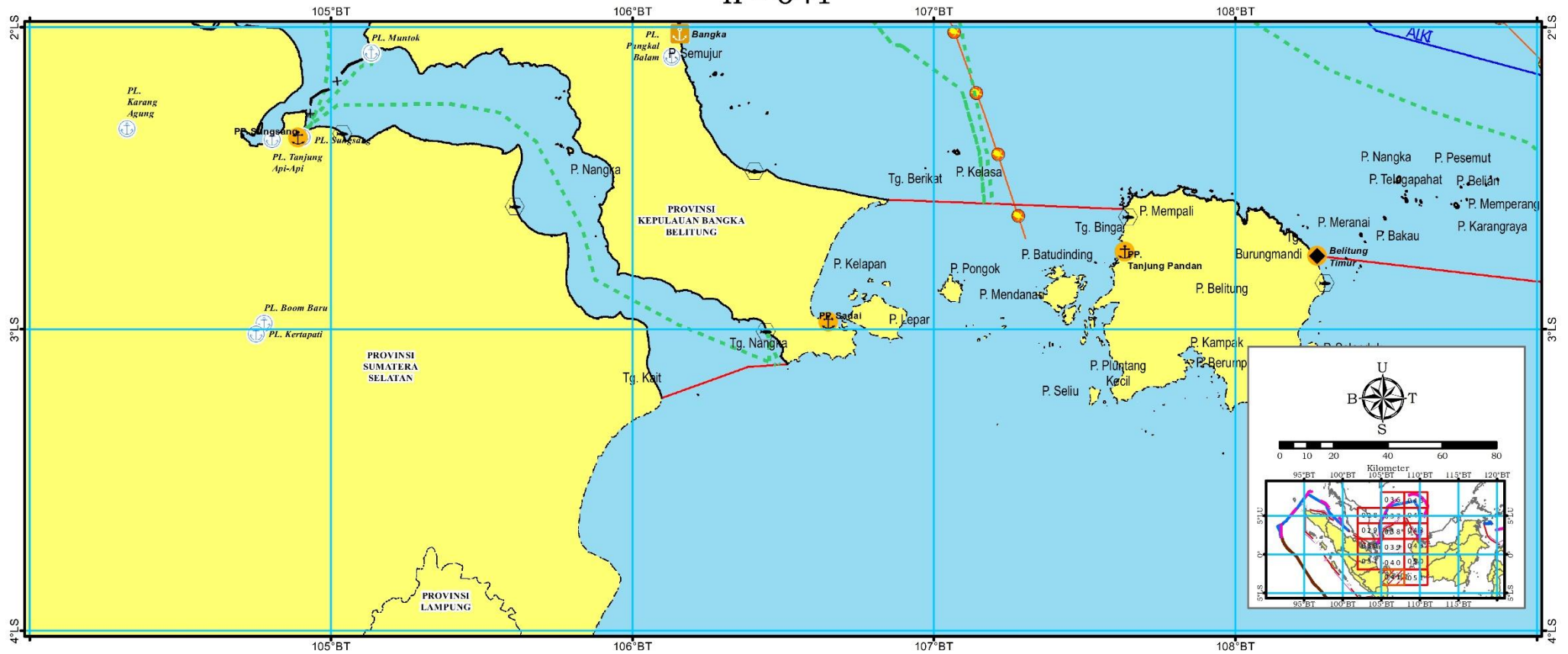
II - 040





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

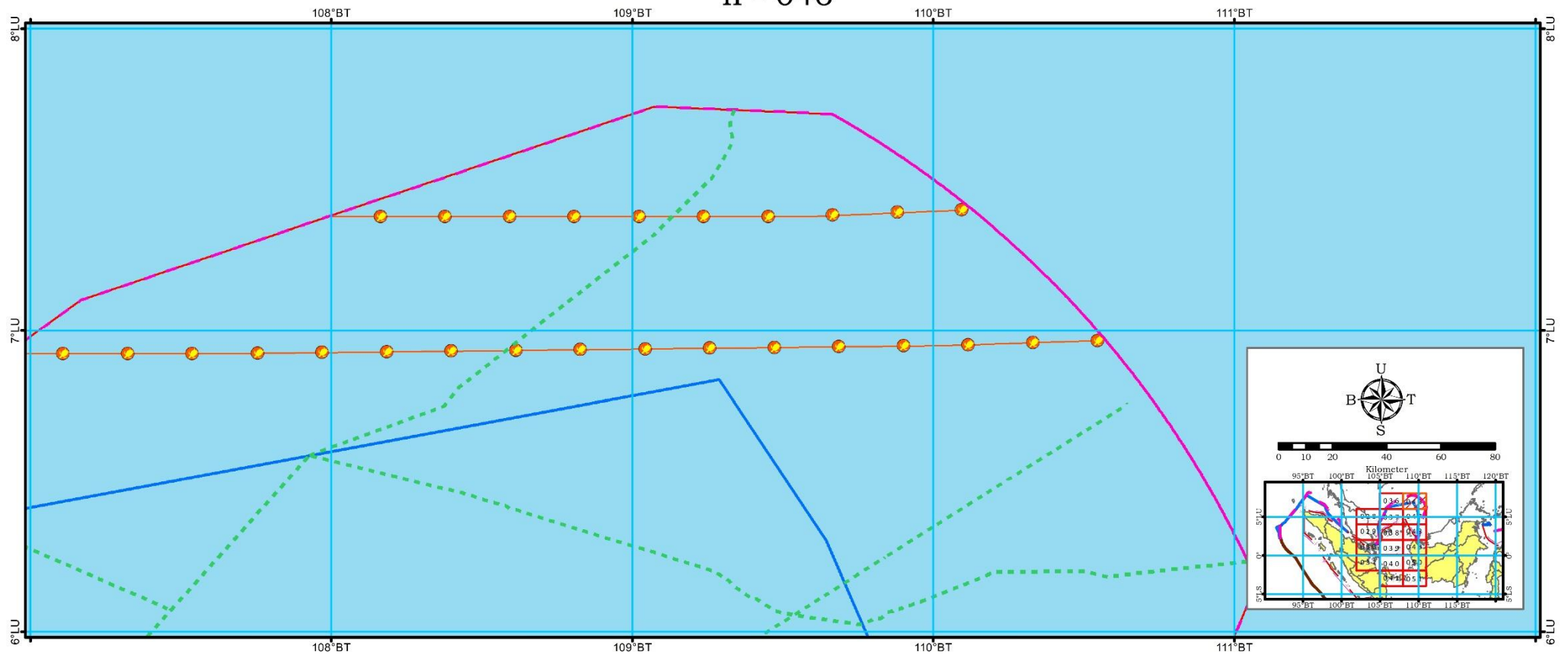
II - 041





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

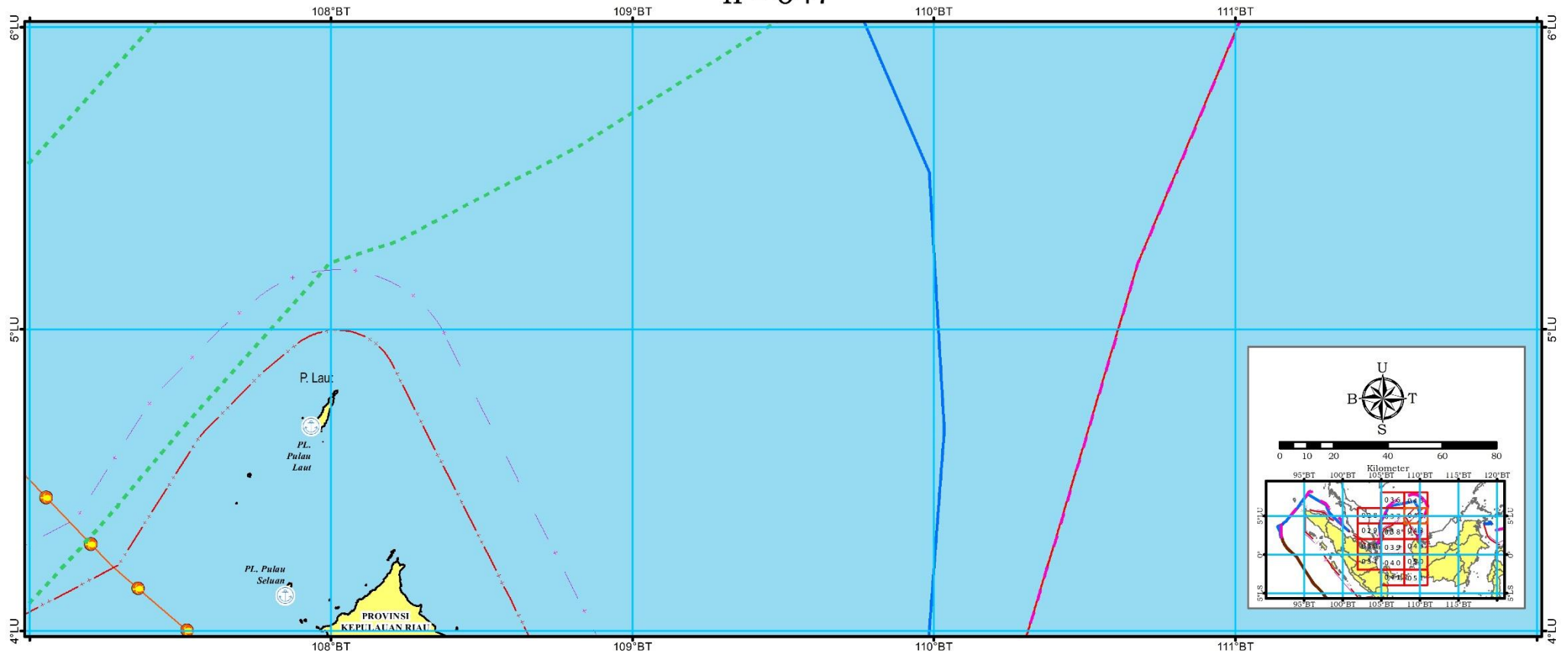
II - 046





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II - 047

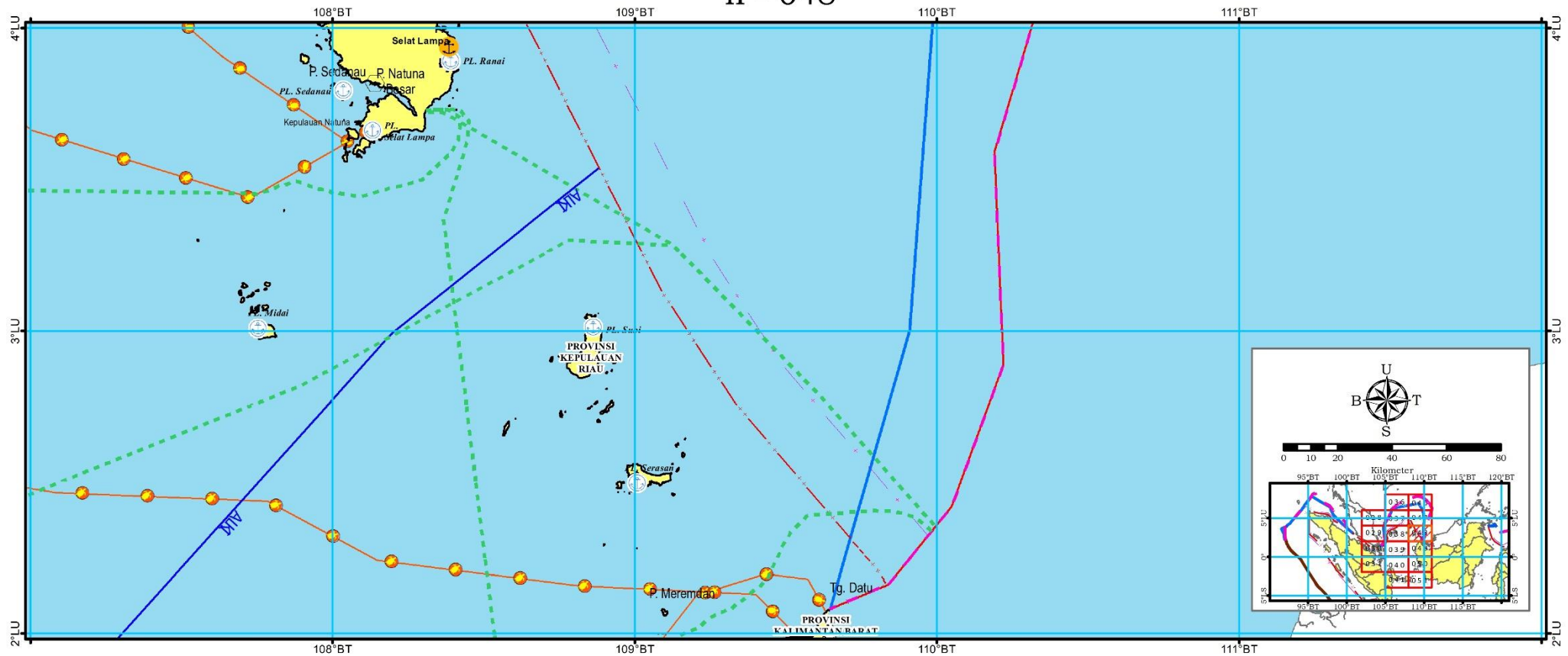






PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

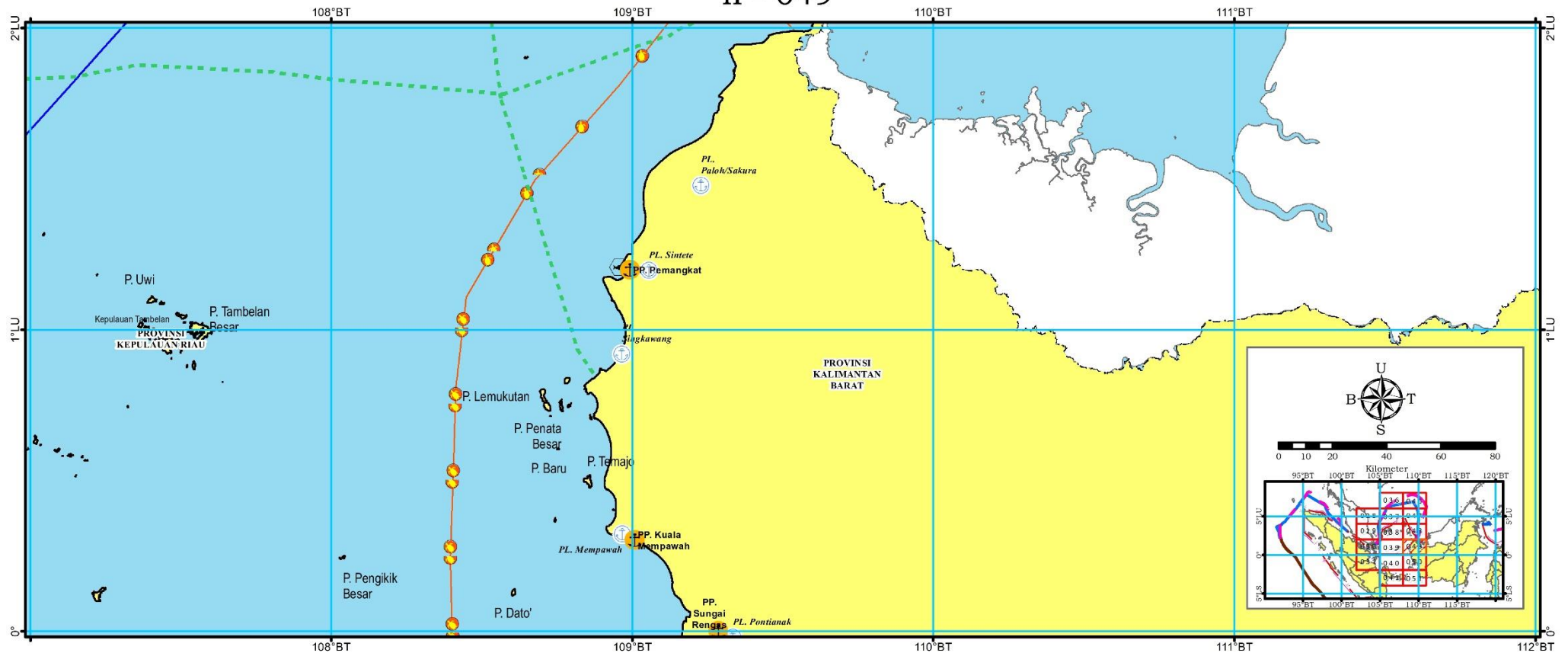
II - 048





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

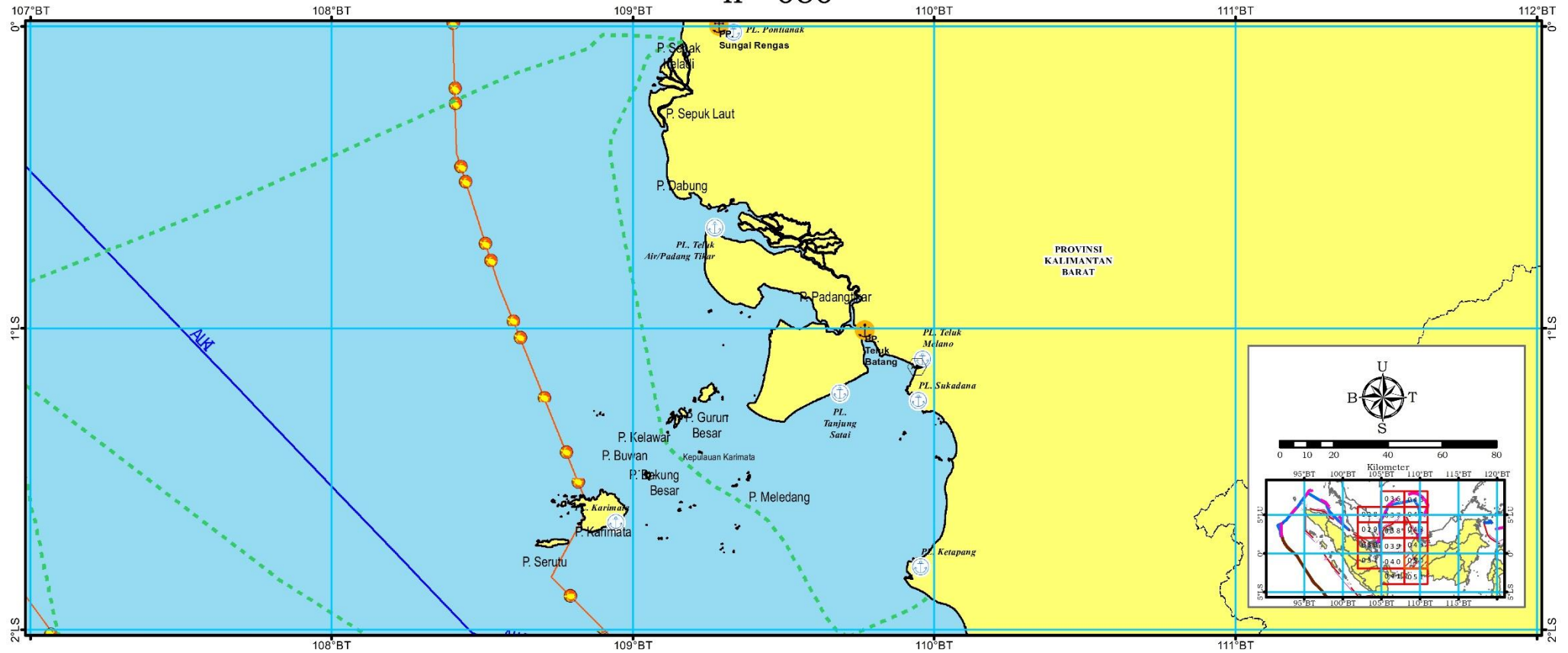
II - 049





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II - 050





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II - 051



Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA



Putri Lida Nur Hafidza, Koordinator  
Kebijakan dan Administrasi Hukum,

Lyda Silvana Djaman

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

SK No 002797 C